



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas implementasi pajak daerah dan retribusi daerah, dibutuhkan perluasan dan penambahan komponen retribusi baru yang mengakomodasi perkembangan kebutuhan daerah sehingga Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih memerlukan penyempurnaan;

b. bahwa mendasarkan pada ketentuan pasal 90 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyebutkan “Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD”;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Pembentukan Panitia Khusus dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 59);

Memperhatikan :

1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 14 Oktober 2025;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor B/100.1.4.2/3870 tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Permohonan Personel Pansus;
3. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Kota Surakarta Nomor 014/K/FPKS/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Personil Pansus;

4. Surat dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia Kota Surakarta Nomor 0095/F-PSI/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Penyampaian Nama Personil Pansus;
5. Surat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Surakarta Nomor 005/F-GERINDRA/B/X/2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Personil Pansus;
6. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Surakarta Nomor 06/ST/F.PDI-P/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Anggota Pansus Fraksi PDI Perjuangan;
7. Surat dari Fraksi Karya Amanat Bangsa Kota Surakarta Nomor 03/10/B/FKAB/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Susunan Keanggotaan Pansus;
8. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus ini bertugas :
1. Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 2. Melaporkan hasil pembahasannya melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus ini dibantu oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Oktober 2025



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DALAM
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

SUSUNAN PANITIA KHUSUS
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	N A M A	JABATAN	U N S U R
1.	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Ketua	Fraksi Karya Amanat Bangsa
2.	Dr. Sakidi, S.E., Ak., M. Si.	Wakil Ketua	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3.	YF. Sukasno, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
4.	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
5.	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
6.	Giyatno, A. Md.	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
7.	Suwanto	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
8.	Baruna Wasita Aji	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
9.	Ngadiyo	Anggota	Fraksi PDI - Perjuangan
10.	Dr. Agus Widodo, S. T., M. M.	Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
11.	Tri Mardiyanto	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
12.	Herson Rikumau, S. Kep.	Anggota	Fraksi Partai Solidaritas Indonesia
13.	Agung Harsakti Pancasila	Anggota	Fraksi Partai Gerindra
14.	Drs. Achmad Sapari, M. M.	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa
15.	Daniel Rizky Waluyo	Anggota	Fraksi Karya Amanat Bangsa

